

BEREBUT AIR DI TANAH AIR

Perubahan sosial-Ekonomi, Makna Air,
dan Masa Depan Sistem Pertanian

Budi Setiyono

Abstract: Air, sebagai salah satu sumberdaya pokok dalam system pertanian, belum mendapatkan perlindungan yang semestinya dalam hal tata guna dan eksploitasinya. Eksploitasi sumberdaya public ini, baik untuk kebutuhan industri maupun pemenuhan kebutuhan rumah tangga di pedesaan telah menggeser makna air dari *public good* menjadi sesuatu yang *private*, bahkan *comodified*. Melalui penelaahan terhadap dua kasus, eksploitasi air tanah oleh pabrik dan ‘pralonisasi’ air sumber untuk kebutuhan rumah tangga, tulisan ini berusaha menunjukkan bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat petani pedesaan (*rural peasant society*) berpengaruh terhadap pemaknaan atas air itu yang secara tidak langsung memengaruhi masa depan sistem pertanian.

Keywords: eksploitasi • *public good* • makna air • privatisasi • komodifikasi •

Tulisan ini berusaha menelaah masalah air dan/atau kepengairan, sebagai bagian dari persoalan agraria dari sisi pemaknaan dan relasinya bagi pembentukan komunitas petani. Selama ini, masalah air lebih banyak disorot dari sisi ekologis semata-mata, seperti: pencemaran dan kerusakan alam (Suharjo, 2006), banjir (Luknanto, 2002; Wangsaatmaja, 2006), yang sebagian besar merupakan akibat ulah manusia Indonesia modern. Dalam tulisan ini, secara etnografis akan coba diperlihatkan bahwa persoalan yang banyak didiskusikan itu, langsung atau tidak langsung, melahirkan dampak pada pergeseran makna dan pembentukan komunitas pertanian yang cenderung menjadi rapuh.

Air menjadi salah satu sumber daya yang paling penting bagi hidup dan pembangunan manusia. Pernyataan yang paling eskstrim, misalnya: “tidak akan ada kehidupan” jika tidak ada air. Maka, tidak mengherankan jika para peneliti luar angkasa berkeyakinan bahwa di planet Mars telah ada kehidupan. Pasalnya, beberapa temuan mutakhir menunjukkan bahwa di

Planet Merah itu terdapat tanda-tanda keberadaan air. Dengan bukti awal itu, para ilmuwan berspekulasi bahwa kehidupan tahap paling primitif dalam rantai evolusi sedang berlangsung di sana.

Secara hukum, pengaturan air termaktup dalam UU No 11/1974 mengenai irigasi yang kemudian diperbaharui dalam UU No. 7/2004 mengenai sumber daya air (Kardono, Tth: 3). Undang-undang yang mengatur masalah air, agaknya hanya berkenaan dengan urusan keirigasian (pengairan untuk tujuan pertanian), yang oleh karena perubahan struktur sosial yang demikian hebat, hal itu di masa kini tidak lagi memadai. Perubahan terminologi dalam undang-undang, dari “irigasi” menjadi “sumber daya air”, tentu saja dimaksudkan untuk memperluas cakupan dan kewenangan negara dalam mengelola dan mengatur persoalan air dari sekedar hanya menyangkut keperluan pertanian/perkebunan. Dengan undang-undang ini, mestinya negara memiliki kekuasaan yang luas untuk mengatur sumber daya itu bagi kemaslahatan bersama dalam azas keadilan. Pada tingkat realitas, eksploitasi, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun komoditas terhadap air dilakukan dengan “penuh kebebasan”, nyaris seperti tanpa batasan aturan. Yang terjadi kemudian adalah kelangkaan air bagi sebagian penduduk, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari (MCK). Di saat yang sama, upaya konservasi dan preservasi lebih merupakan retorika politik atau malah lahan proyek yang berlangsung sesaat tanpa keberlanjutan.

Pertambahan populasi manusia yang sedemikian tinggi, proses alih guna lahan baik untuk industri maupun dari hutan menjadi area olahan berlangsung dalam skala massif, penggunaan bahan-bahan kimia buatan baik untuk pupuk maupun keperluan hidup sehari-hari serta limbah buangan industri, telah berdampak secara langsung pada penurunan kualitas dan kuantitas air. Dampak tidak langsung yang juga segera -atau bahkan telah- terjadi adalah konflik secara horisontal maupun vertikal, oleh karena mendadak air menjadi sumber daya yang terbatas (*scarce*) yang untuk mendapatkannya harus diperebutkan. Jika memang demikian halnya, maka kasus-kasus yang pernah terjadi menyangkut perebutan hak atas tanah, akan terjadi juga bagi kandungan yang ada di dalam dan/atau melewati permukaannya¹ (Lih. Lounela, 2002; Agustono, 2002).

Dibandingkan persoalan tanah, masalah kepengairan memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Dalam masalah tanah, negara telah mengatur hal-hal yang menyangkut tata guna, karakteristik, maupun kepemilikan, sehingga konflik-konflik berkenaan dengan hal itu umumnya

¹ Dalam disiplin ekologi, air dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu air permukaan (*surface water*) dan air tanah (*ground water*).

disebabkan oleh pengingkaran atas hak-hak dan penyelewengan administratif atau implementasi. Sebaliknya, dalam konteks Indonesia modern, air hingga saat ini masih menjadi semacam “barang bebas” yang siapa saja bisa mengakses tanpa batasan-batasan secara memadai. Padahal, sesungguhnya, secara tradisional banyak komunitas lokal yang telah memiliki pranata yang mengatur, mengkonservasi, maupun mereservasi sumberdaya air.² Dengan pertumbuhan populasi yang semakin tinggi dan perubahan struktur sosial ekonomi, air niscaya akan menjadi sumber daya yang semakin langka dan berharga. Akibatnya, eksploitasi terhadapnya tanpa tatanan yang memadai dengan azas keadilan dan pemerataan akan cenderung mendorong perubahan sosial budaya yang arahnya bisa tak terduga. Bagaimana pengaruh eksploitasi air tanah (*ground water*) dan air permukaan (*surface water*) terhadap pandangan komunitas atas air? Mengapa keberlanjutan sistem pertanian menjadi tidak menentu?

Berlandaskan pada data yang diperoleh melalui pengamatan sementara atas kasus eksploitasi air tanah oleh pabrik-pabrik di kawasan Palur, Solo, dan ‘pralonisasi’³ di desa-desa kawasan timur Wonogiri. Tulisan ini mencoba menjelaskan pengaruh pengelolaan sumber daya terhadap cara pandang masyarakat mengenai air dan keberlanjutan sistem pertanian.

Kerangka Teoretik

Pertanyaan dasar yang diajukan di atas pada dasarnya menyangkut bagaimana kondisi material di suatu lingkungan (*space*) pada waktu tertentu (*time*) berpengaruh terhadap kebudayaan. Hal ini mengingatkan kita pada pendekatan *cultural materialism* dengan salah satu konsep pokoknya, ‘*mode of production*’ yang bisa memberi perspektif yang cukup menarik. Menurut Marx,

” *The mode of production in material life determines the general character of the sosial, political, and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but on the contrary, their sosial existence determines their consciousness*” (Harris, 1979: 55).

Marvin Harris, sebagai ekponen penting dari pendekatan *cultural materialism* menanggapi secara kritis prinsip *mode of production* dari Marx dengan mengembangkannya lewat konsep “*ethic behavioral mode of production and reproduction*”. Dalam pandangan *cultural materialism*, struktur universal dari

² Ilustrasi mengenai hal ini akan disajikan pada bagian berikut.

³ Istilah “pralonisasi” kami gunakan untuk menggambarkan tindakan masyarakat yang memasang pipa “paralon” (dalam ucapan masyarakat setempat: “pralon”) guna menyalurkan air dari sumbernya ke desa atau pun rumah masing-masing.

sistem sosial budaya bertumpu pada konstanta biologis dan psikologis alam manusia, dan pembedaan antara pikiran dan perilaku, serta etik dan etik.⁴ Pertama, setiap masyarakat harus mengatasi masalah-masalah produksinya: yang secara perilaku akan memuaskan kebutuhan minimal subsistensi, dan dalam hal ini harus ada *ethic behavioral mode of production*. Kedua, setiap masyarakat secara perilaku harus mengatasi masalah reproduksi: menghindari penambahan atau pun penurunan besaran populasi yang destruktif, dalam hal ini harus ada *ethic behavioral mode of reproduction*. Ketiga, setiap masyarakat harus memenuhi kebutuhan pemeliharaan keamanan dan hubungan perilaku yang teratur di antara kelompok-kelompok konstituen dan juga dengan masyarakat lainnya (Harris, 1979: 51).

Mode of production, menurut Harris, adalah teknologi dan praktek-praktek yang digunakan untuk memperluas atau sebaliknya membatasi produksi subsisten dasar, terutama produksi pangan, dan berbagai bentuk energi, di mana hambatan dan peluang yang ada pada teknologi tertentu akan berinteraksi dengan habitat tertentu. Unsur-unsurnya meliputi teknologi subsistensi, hubungan tekno-ekologi, ekosistem dan pola kerja. Sementara itu, *modes of reproduction* adalah teknologi dan praktek-praktek yang digunakan untuk memperluas atau sebaliknya membatasi dan memelihara besaran populasi. Moda ini meliputi demografi, pola pertemanan, tingkat kesuburan, kelahiran dan kematian, perawatan bayi, kontrol medis terhadap pola demografi serta kontrasepsi, aborsi, dan pembunuhan terhadap bayi (Harris, 1979: 52).

Selanjutnya Harris meringkas gagasan mengenai *the modes of production and reproduction* itu ke dalam satu istilah yang digunakan Marx, yaitu *infrastructure* yang oleh Harris (1979), diberi pengertian sebagai suatu tapal batas antara *culture* dan *nature*, batas yang melintasi kendala-kendala ekologis, kimiawi dan fisikal dengan mana tindakan manusia adalah subjek yang berinteraksi dengan prinsip-prinsip praktek sosio-budaya untuk mengatasi dan memodifikasi kendala-kendala itu (Harris, 1979: 57).

Dalam kaitan dengan kasus-kasus yang akan ditelaah di sini, eksploitasi air tanah oleh pabrik dan pengaliran air dari sumbernya ke rumah-rumah penduduk merupakan suatu kondisi material yang mengalami perubahan. Di sini sebuah perubahan moda produksi maupun reproduksi sedang terjadi, dan pada gilirannya akan memengaruhi karakter umum corak sosial, politik, bahkan spiritual. Ketika moda perilaku etik untuk produksi bagi kebutuhan subsistensi petani pedesaan bergeser oleh karena terjadinya

⁴ Untuk keperluan tulisan ini hanya akan dijelaskan mengenai *mode of production and reproduction*, sedangkan mengenai etik-etik dan pembedaan pikiran dan perilaku akan diabaikan.

kelangkaan material air, maka hal itu akan menentukan corak relasi-relasi yang menyangkut dan berkenaan dengan material dan pemaknaan atasnya.

Air untuk Pabrik dan Privatisasi *Public Goods*

Palur sebenarnya adalah nama sebuah desa yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, namun nama itu kemudian secara umum digunakan untuk menyebut sebuah kawasan di sebelah timur kota Solo yang terdiri dari beberapa bagian kelurahan/desa, seperti Ngringo, Dagen, Palur, dan Triyagan. Desa/kelurahan itu secara administratif masuk dalam wilayah kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, berbatasan dengan kotamadya Surakarta. Sejak sekitar tahun 1985, ada kebijakan tidak resmi,⁵ bahwa daerah yang sebenarnya sangat subur ini dialihkan menjadi kawasan industri. Sesudah itu, satu persatu pabrik-pabrik berskala kecil, menengah, dan besar berdiri di daerah itu, yang hingga saat ini jumlahnya mencapai puluhan. Beberapa pabrik berskala besar di antaranya memproduksi bahan kimia (PT. Indo Acidatama, PT. Palur Raya), jamu (PT. Jamu Air Mancur), tekstil (PT. Kusumahadi Santosa), serta puluhan pabrik berskala menengah dan kecil lainnya.

Kawasan industri itu terletak tidak jauh dari pemukiman warga. Di dusun Jetak dan Songgorunggi misalnya, posisi pabrik hampir menyatu dengan pemukiman warga yang telah ada jauh sebelum pabrik berdiri. Kehadiran pabrik itu, tentu saja membawa pengaruh tertentu bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Pengaruh yang langsung tampak dan dirasakan adalah terjalannya relasi dengan warga baru, dengan status sosial yang berbeda, yang sebelumnya tidak mereka kenal. Bersamaan dengan itu mereka pun mulai mengenal, dan sebagian terlibat dengan, spesialisasi pekerjaan yang sebelumnya juga tidak mereka kenal. Misalnya: pekerjaan di bidang keamanan, buruh untuk berbagai segmen dan jenis produksi, seperti tekstil, plastik, bahan kimia, dan lain-lain, dengan siklus kerja *shift* dan aturan kerja yang terstruktur ketat. Mereka yang sebelumnya kebanyakan adalah petani atau tukang dan buruh bangunan, juga mulai mengenal tata kerja dan cara produksi (*mode of production*) yang sama sekali baru. Pada tingkat tertentu hal itu akan berpengaruh pada tata hubungan di antara mereka, tetapi terutama dengan para pendatang di sekitar mereka.

Sebelum pabrik hadir, penduduk di dusun-dusun sekitar Palur secara umum bisa dikategorikan sebagai petani pedesaan (*rural peasant society*). Mereka kebanyakan menggantungkan hidupnya pada pertanian sawah, dan

⁵ Karena keterbatasan waktu, data resmi mengenai hal ini tidak berhasil diperoleh.

hidup dalam pola yang khas pedesaan (Wolf, 1966; Redfield, 1965). Dalam komunitas semacam ini, sumber daya air merupakan *public goods* yang bisa diambil oleh siapa saja secara bebas. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti minum dan masak, mereka membuat sumur gali. Sumur itu, kendati merupakan milik pribadi keluarga tertentu, tetapi biasanya satu sumur digunakan oleh beberapa keluarga. Untuk memanfaatkan air itu, para pengguna tidak diwajibkan untuk membayar atau memberi kontribusi apapun. Sebagai barang umum, air hampir tidak pernah diperebutkan dan agak jarang terjadi konflik antar sesama warga menyangkut air yang digunakan secara bersama itu. Ada kepercayaan yang berkembang di kalangan mereka bahwa memperebutkan air untuk kebutuhan sehari-hari akan menghadirkan petaka.

Untuk kebutuhan lain, buang air besar misalnya, warga dusun juga terbiasa memanfaatkan *public goods*. Sehari-hari, kebanyakan penduduk dusun-dusun sekitar Palur membuang “hajat” besar ini di sungai atau parit-parit kecil yang ada di sekitar rumah mereka.⁶ Dari pengamatan selintas, hanya sebagian kecil penduduk asli dusun Songgorurunggi yang memiliki WC. Artinya, sampai sebelum kehadiran pabrik, air menjadi sumber daya umum (*public goods*) yang bersifat bebas, dan mudah diakses oleh siapa saja. Pola ini mirip dengan laut, yang untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat darinya, orang tidak harus melakukan budidaya dan menguasainya.

Seperti telah disebut pada bagian terdahulu, sekitar 1985 pabrik-pabrik berskala besar, sedang, maupun kecil mulai berdiri di sekitar kawasan Palur. Kehadiran moda produksi massal ini membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan penduduk di dusun-dusun di sekitarnya. Perubahan yang paling awal tampak adalah pada corak komunitas, dari yang semula berciri *rural peasant society* bergeser menjadi *sub-urban society*. Kawasan Palur masa kini merupakan daerah penyangga dan peralihan bagi kawasan urban, kota Solo. Pergeseran itu tentu berakibat pada perubahan pola-pola relasi dalam komunitas, yang pada gilirannya sedikit banyak juga berakibat pada pergeseran di tingkat struktur sosial.

Perubahan juga terjadi pada aspek alamiah (Lih. Suharjo: 2006), tetapi kemudian berdampak lanjut pada sistem sosial budaya. Secara umum diketahui bahwa pabrik, selain membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar, juga memerlukan sumberdaya alam untuk mengolah bahan baku menjadi barang produksi. Oleh karena barang yang diproduksi berjumlah besar, maka sumber daya yang dibutuhkan juga berskala besar. Salah satu sumberdaya paling pokok adalah air, yang biasanya berupa air tanah. Pilihan

⁶ Jika kita memercayai kerangka evolusi kebudayaan, ciri semacam itu merupakan sisa-sisa peradaban meramu (*food gathering*)



menggunakan air tanah, tentu didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kemudahan eksplorasinya. Tidak mengherankan jika pabrik selalu didirikan di kawasan yang ketersediaan airnya memang mencukupi. Kehadiran pabrik juga membawa perubahan yang menyangkut lingkungan alam (*nature*) beserta sistem nilai dan cara pandang terhadapnya (*nurture*). Dengan menggunakan mesin penyedot berkapasitas sangat besar, pabrik-pabrik di sekitar kawasan Palur ibarat naga-naga yang sangat haus akan air. Mereka seolah berlomba memuaskan rasa dahaga itu dengan menghisap sebanyak-banyaknya air tanah yang tersedia. Akibatnya tentu mudah diduga. Air tanah yang berada di lapisan-lapisan relatif atas, dalam radius yang cukup luas hingga ke dusun-dusun di sekitar pabrik-pabrik itu berdiri, nyaris habis tersedot. Pada musim kemarau, sumur penduduk menjadi hampir kering.

Keadaan kekurangan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendorong sebagian warga yang memiliki kemampuan keuangan mencari sumber air lain selain sumur. Bersamaan dengan itu, entah hanya secara kebetulan atau mungkin memang disengaja, saluran air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mulai diintroduksi dan masuk ke dusun itu. Warga dusun yang memiliki cukup uang untuk membayar pemasangan instalasi dan tagihan bulanan memilih untuk berlangganan air dari PDAM. Pada titik ini, perubahan pada level kultural sedang terjadi. Air yang pada mulanya merupakan *public goods* yang bisa begitu saja dipetik dari alam, serta-merta berubah menjadi komoditas yang harus dibeli. Ia tidak lagi menjadi barang bebas yang setiap orang boleh begitu saja mengambilnya, melainkan berubah menjadi milik pribadi yang jelas batas-batasnya, dan dengan demikian juga harus dijaga. Ekonomi uang tidak hanya merambah barang kebutuhan yang mereka tidak mampu produksi sendiri, tetapi juga menjangkau kebutuhan paling dasar yang sebelumnya telah disediakan oleh alam, sehingga tidak perlu mereka produksi.

Gejala privatisasi *public goods* terus bergerak ke arah komodifikasi yang menempatkan warga desa sebagai konsumen. Di masa lampau, minum air (mentah) yang langsung diambil dari sumur menjadi hal yang biasa. Adalah hal yang lazim terjadi di masa lampau bila sebuah keluarga di desa menyediakan air matang dalam *kendi* dan diletakkan di depan rumah. Orang-orang yang melewati dusun itu dan merasa kehausan dengan bebas bisa meminum air itu, lalu melanjutkan perjalanannya. Ketika air telah menjadi sumber daya yang terbatas, dengan kualitas yang semakin buruk, untuk minum air putih orang bahkan tidak cukup hanya mematangkan air yang mereka dapat secara bebas. Untuk minum air putih, mereka harus membelinya dalam kemasan galon dengan jumlah uang yang cukup untuk membeli 2 liter beras. Di sini, privatisasi telah bergerak pada wilayah komodifikasi. Belakangan, gejala komodifikasi air, kendati tidak secara



langsung, juga terjadi pada air permukaan (*surface water*) untuk kebutuhan pertanian. Pada musim kering, untuk bisa mengairi sawahnya, petani di dusun-dusun itu harus menyewa mesin *diesel* guna memompa air dari sungai atau sumur-sumur bor. Pada titik ini, sumber daya air telah mewujud menjadi barang modal bagi petani yang untuk mendapatkannya juga memerlukan modal. Pola seperti ini menunjukkan tanda-tanda kapitalisme paling awal, di mana modal akan berakhir atau menghasilkan modal dan bukannya barang untuk dikonsumsi. Hal seperti itu, hampir tidak pernah terbayangkan sebelumnya karena air adalah barang yang tersedia bebas di alam dan siapa saja bisa mengambilnya dengan cukup mudah.

'Pralonisasi':

Air Mengalir Sampai Dapur, Petani (Merantau) Sampai Jakarta

Kasus kedua (akan digambarkan secara sepintas) mengenai pemanfaatan air tanah dari sumber alami untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga di desa-desa di kawasan Wonogiri sebelah timur. Di kalangan orang luar, Wonogiri dikenal sebagai daerah tandus yang miskin dan kekurangan air. Gambaran itu tidak seluruhnya benar, karena ada daerah-daerah tertentu di Wonogiri yang subur dan memiliki sumber air cukup melimpah. Daerah yang dimaksud adalah kawasan sebelah timur yang menghubungkan wilayah itu dengan kabupaten Ponorogo. Secara tradisional wilayah itu dikenal sebagai daerah Keduwang, yang pada masa kini terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisrono, Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Bulukerto dan Purwanto. Posisi Keduwang berada di lereng selatan gunung Lawu dengan kontur tanah naik-turun, beriklim sejuk serta terdapat banyak sumber mata air. Sungai-sungai kecil banyak terdapat di daerah itu dengan berhulu di gunung-gunung sekitar Lawu dan menyatu ke aliran Bengawan Solo. Selain bersumber di hulu, sungai-sungai itu juga menampung sumber-sumber air dari tebing-tebing sungai dan sawah berteras, yang jumlahnya mencapai ribuan.

Secara struktural, komunitas di Keduwang juga bercorak *rural peasant society*. Sampai dasawarsa delapanpuluhan, sebagian besar penduduknya sebagai petani sawah maupun kebun. Mengambil kasus di kecamatan Girimarto, misalnya, hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja sebagai pedagang, tukang, pegawai pemerintah, atau bekerja di sektor jasa. Dari sebagian kecil penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian, umumnya mereka juga bekerja sampingan sebagai petani, atau malah sebaliknya, pertanian ditempatkan sebagai pekerjaan pokoknya dan berdagang atau menjadi tukang sebagai pekerjaan sampingan. Secara umum, jenis tanaman yang lazim mereka tanam adalah tanaman pangan, yakni padi dan ketela pohon serta palawija. Sebagian besar dari hasil pertanian ini digunakan



untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka, dan sisanya dijual untuk memperoleh uang *cash* guna membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak mampu produksi sendiri, seperti gula, garam, minyak, teh, dan sebagainya.

Pada masyarakat yang bercorak seperti yang digambarkan di atas, air permukaan menjadi sumber pokok bagi sistem pertanian yang merupakan gantungan hidup paling utama. Gambaran betapa pentingnya kedudukan air sungai, di antaranya tampak pada “mantera” (*ujub*) yang biasa diucapkan pada upacara-upacara kenduri.

“...*ingkang sak bab malih kangge memetri kanjeng sunan kalijaga ingkang jaga kali. Dipun pepetri amrih saget kapendbet toyanipun rintem kalawan dalu mugu-mugu mberkahi dumateng anggenipun tetanen....*”⁷

Dalam kepercayaan komunitas setempat, Sunan Kalijaga bertugas menjaga sungai agar air terus mengalir dan mendatangkan rejeki bagi semua warga. Untuk itu, setiap kali warga melakukan ritus *slametan* untuk keperluan apa pun, terlebih yang berkenaan dengan pertanian, misalnya *methik*,⁸ selalu ada bagian yang disajikan untuk sang Kalijaga.

Secara tradisional, komunitas setempat menciptakan pranata sosial untuk memelihara dan melindungi sumber daya air yaitu lewat pranata *sambatan* atau gotong-royong. Secara periodik, para petani pemilik sawah melakukan gotong-royong untuk merawat dan memperbaiki saluran air yang melewati sawahnya. Biasanya aktivitas itu dilakukan pada setiap hari Jumat, sehingga mereka kenal dengan nama *Jemuahan* (Jumat-an). Satuan-satuan kelompok gotong-royong ini ditentukan oleh kesamaan aliran air yang melewati area sawah tertentu. Istilah-istilah seperti *kuli kenceng* yang diberlakukan sejak masa pemerintah kolonial Belanda juga masih dikenal, untuk membedakan kewajiban-kewajiban berdasarkan luasan lahan yang dimiliki. Setiap petani dalam area aliran air dengan luasan lahan tertentu berkewajiban untuk mengambil bagian dalam kegiatan itu, dan pengingkaran terhadapnya akan mendatangkan sanksi sosial yang cukup buruk bagi mereka.

⁷ Artinya, “... satu bagian lagi dipersembahkan bagi Sunan Kalijaga yang menjaga sungai. Dipersembahi agar bisa diambil airnya siang dan malam semoga memberi berkah kepada pertanian...”

⁸ *Methik* (memetik) adalah *slametan* (selamatan) yang diselenggarakan untuk menandai mulainya panen padi, yang antara lain untuk “memuja” Dewi Sri yang diyakini sebagai ratu padi. Di tempat lain, ritus ini juga dikenal dengan nama *wiwit* (mulai).



Pranata gotong-royong juga mengatur masalah pembagian air yang acapkali menimbulkan konflik terbuka antar petani. Sumber air yang terbatas, terutama di musim kering, seringkali membuat seorang petani berusaha mendapatkan jatah air yang lebih dengan cara-cara yang oleh petani lain dianggap mengurangi haknya mendapatkan jatah air. Akibatnya, konflik (yang kadangkala sampai melibatkan kekerasan fisik) antarpetani mudah terjadi. Dalam kasus seperti itu, seorang laki-laki harus berani mengorbankan dirinya, karena air bukan hanya sesuatu yang membasahi tanah sawah mereka tetapi adalah kehidupan bagi mereka. Ungkapan “*sedumuk bathuk senyari bumi*” yang artinya kira-kira adalah “selebar telapak di dahi, seluas tampi bumi”, adalah ungkapan tentang tekad mempertahankan hak atas bumi dan air yang berarti pula harga diri mereka. Air adalah kelangsungan hidup dan dengan demikian juga harga diri.

Pada gambaran yang terakhir ini, air telah bergerak dari level material (*nature*) ke level simbolik (*culture/nurture*). Maka, pemeliharaan dan perlindungan atas sumber air juga dilakukan lewat cara-cara simbolik. Ritus-ritus *slametan* menyangkut lingkaran hidup maupun ritus yang bersifat insidental hampir selalu menyertakan pembacaan “mantra” seperti yang dikutip di atas. Pemujaan seperti itu pada galibnya merupakan cara-cara simbolik untuk memelihara kelestarian salah satu sumber daya yang paling pokok, yang berarti pula merupakan cara mereservasi sebagian dari sistem gagasan petani mengenai alam.

Ketika tingkat ekonomi dan pendidikan penduduk secara perlahan mengalami peningkatan dan desa mengalami keterbukaan akses secara timbal-balik terhadap kota,⁹ perubahan struktural mulai terjadi, mulai dari elemen-elemen paling kecil. Sebuah perubahan yang dimulai dari arah dan cara yang agak kurang bisa diduga adalah apa yang dalam tulisan ini disebut “pralonisasi”. “Pralonisasi” yang dimaksud di sini adalah usaha swadaya dan spontan dari sebagian besar warga sebagai usaha untuk memperoleh air bersih dengan cara mengalirkan ke dalam rumah masing-masing warga menggunakan pipa paralon langsung dari sumber-sumber mata air. Pada awalnya, pengaliran air ini dilakukan secara kolektif oleh warga satu atau dua dusun. Mereka mengalirkan air dari sumber yang cukup besar menggunakan pipa yang juga cukup besar, lalu di titik-titik tertentu dibuat pembagian/percabangan untuk bisa sampai ke rumah masing-masing warga. Artinya, pengaliran air pada awalnya tidak banyak berbeda dengan cara kerja ledeng dari P(D)AM, tetapi dibuat secara swadaya. Dengan cara kolektif ini, jumlah

⁹ Sejak pertengahan decade 80-na, akses ke kota besar, terutama Jakarta, menjadi begitu terbuka, karena sejumlah perusahaan bus yang ada di daerah itu membukakan trayek ke kota-kota tersebut. Pada saat sekarang, ratusan bus malam dari kelas ekonomi hingga eksekutif, berangkat dan datang membawa penumpang dari dan ke daerah itu.



sumber yang diambil relatif tidak banyak. Tetapi cara berkelompok seperti itu belakangan dianggap tidak efisien dan sering menimbulkan konflik yang disebabkan oleh masalah pemeliharaan saluran dan pembagian air untuk warga dua tiga dusun yang kadang sulit untuk bisa diatur secara benar-benar adil. Akhirnya, warga berusaha untuk masing-masing keluarga. Jika berkelompok, paling-paling hanya dua atau tiga keluarga, yang mengalirkan sendiri air tersebut ke rumah-rumah mereka. Hampir tidak ada rumah warga yang tidak dialiri air lewat pipa paralon. Akibatnya, sisi kanan-kiri sungai dan pematang-pematang sawah di banyak dusun di kawasan Keduwang pada saat sekarang ini akan mudah dijumpai lalu-lalang pipa-pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{4}$ inci. Itu sebabnya, untuk kebutuhan tulisan ini, gejala itu disebut sebagai “pralonisasi”.

Sumber-sumber mata air itu kebanyakan berada di sisi kanan-kiri sungai dan tebing-tebing sawah, dan sebagian lagi merupakan sumber mata air yang disebut *belik*, yaitu semacam kolam tampungan (*sendang*) tempat warga dusun mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga serta kegiatan mandi dan mencuci. Secara tradisional sumber mata air yang disebut *belik/sendang* diyakini dijaga oleh kekuatan gaib yang bisa memengaruhi kehidupan warga dusun. Oleh karena, pada ritus-ritus *slametan* lingkaran hidup (*life cycle rites*), selain disebutkan persembahan *ujub*-nya, juga secara khusus diberi sesaji berupa aneka makanan dan bunga serta bahan lainnya, dengan tujuan memberi berkah dan sang penunggu *sendang* tidak membuat gangguan selamanya.

Pengaliran air dari sumber langsung ke dalam rumah-rumah warga (“pralonisasi”) bertujuan untuk membuat hidup menjadi lebih mudah dan sejahtera. Sebelum “pralonisasi”, warga memenuhi kebutuhan air untuk rumahtangganya dengan mengambil di *belik-belik* yang hampir selalu ada di setiap pinggir dusun, di bawah pohon besar, serta di tepi-tepi sungai. Mandi dan mencuci mereka lakukan di *belik-belik/sendang* itu, sedangkan untuk kebutuhan memasak mereka harus mengangkutnya dengan menggunakan wadah tradisional dari gerabah yang disebut *klenting* atau pun kaleng bekas wadah minyak goreng. Di pagi dan sore hari, akan tampak pemandangan wanita-wanita hanya mengenakan kain (*jarik*) sebatas dada menggendong *klenting*, atau pun lelaki memikul sepasang kaleng berisi air melewati pematang-pematang sawah. Pekerjaan ini juga menjadi kewajiban sekaligus latihan pendewasaan (sosialisasi dan enkulturasi) bagi anak remaja, laki-laki maupun perempuan.

Gambaran di atas dalam foto-foto atau pun film nasional yang kerap menampilkan adegan semacam itu menjadi tampak indah dan eksotik. Akan tetapi, bagi pelakunya, pekerjaan dan kehidupan keseharian yang seperti itu dirasakan sebagai sesuatu yang berat, rendah, dan terbelakang. Persentuhan



orang-orang desa itu dengan peradaban kota,serta peningkatan taraf ekonomi telah mendorong semacam kesadaran dan perubahan pandangan tentang hidup yang “baik”, maju dan mudah. Mereka berimajinasi bahwa cara hidup seperti orang kota adalah kualitas hidup yang dianggap baik dan maju.

Air yang mengalir langsung ke dapur adalah kemudahan dan kemajuan hidup yang mereka bayangkan seperti orang kota. Untuk kebutuhan mandi, cuci dan minum, mereka tidak lagi harus bersusah payah menggondong *kelenting* atau memikul sepasang kaleng dari tempat yang tidak dekat. Mereka pun bisa memiliki kamar mandi yang di masa lampau hanya dimiliki oleh orang kota dan orang-orang dari kelas priyayi terpelajar. Dengan mengalirkan air ke dapur, orang-orang desa yang adalah petani memang mencapai kemudahan dan mereka membayangkan telah mencapai tingkat serta cara hidup orang kota dan para priyayi.

Memang banyak kemudahan dan peningkatan mutu kesehatan yang didapat, karena air itu mengalir sepanjang hari tanpa mereka harus membayar retribusi atau pun biaya listrik. Tetapi, di saat yang sama, mereka sebenarnya secara pasti sedang menciptakan proses mengakhiri keberadaan sungai. Sumber-sumber air yang berukuran sedang dan kecil di tebing-tebing sisi kanan-kiri sungai yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan, berhenti memasok air bagi aliran sungai. Selanjutnya, sebagian besar sungai hanya menampung aliran-aliran air yang berasal dari hujan. Sungai kemudian banyak ditumbuhi gulma dan menyempit, karena hanya mengalirkan air pada musim penghujan.

Upaya pemudahan dan perbaikan mutu hidup komunitas pedesaan dengan mengalirkan air dari sumbernya langsung ke dalam rumah, tanpa sengaja telah menggeser corak masyarakat menjadi *rural peasant society*. Air sungai yang dilindungi, bahkan dalam tingkat simbolik yang sakral, tidak lagi menjanjikan kecukupan, maka pekerjaan pertanian menjadi tidak lagi mengikat, apalagi menarik. Sebaliknya, pekerjaan ini menjadi berarti kotor (karena bergumul dengan lumpur) dan berada pada tingkat yang rendah dalam strata sosial. Akses transportasi yang dengan mudah menghubungkan mereka dengan kota besar seperti Jakarta, menyajikan kepada mereka pilihan-pilihan pekerjaan yang menurut mereka lebih bersih, tinggi, bersifat kekotaan, dan menjanjikan penghasilan tunai (*cash*). Perolehan pendapatan *cash* memang lalu menjadi penting, karena mereka sedang bergeser menjadi komunitas yang banyak mengkonsumsi, dan hanya sedikit memproduksi. Menjadi tukang –atau setidak-tidaknya kuli– bangunan, berdagang sayur atau bakso di Jakarta, menjadi kondektur atau kenek angkutan umum di desa, adalah pilihan-pilihan yang dianggap lebih baik ketimbang bertani di lahan yang tidak lagi diairi oleh sungai.

Kesimpulan

Ada dua kasus yang sebagai gejala berbeda. Kasus pertama, kehadiran pabrik-pabrik di kawasan yang dekat dengan dusun-dusun di pinggir kota, telah menyedot air tanah dalam jumlah besar. Akibatnya, terjadi kelangkaan air tanah yang adalah sumber satu-satunya bagi pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk dusun-dusun di sekitar pabrik. Perubahan makna air terjadi akibat pergeseran struktur sosial ini. Air yang semula merupakan *public goods* yang bebas dan mudah diakses, mendadak menjadi milik privat melalui instalasi ledeng, dan komoditas dalam bentuk air minum dalam kemasan dan pengairan sawah melalui penyewaan pompa. Untuk memenuhi kebutuhan air (minum maupun pertanian), warga seringkali harus menyiapkan uang *cash* yang tidak bisa diperoleh dengan cepat dalam sistem ekonomi pertanian. Akibatnya, pekerjaan-pekerjaan dengan upah kontan, misalnya menjadi tukang atau kuli bangunan, buruh pabrik, bahkan pembantu rumah tangga, menjadi lebih menarik bagi mereka. Pekerjaan pertanian, yang pada akhirnya menjadi pekerjaan dengan resiko cukup tinggi karena memerlukan modal yang cukup besar serta kemungkinan gagal akibat serangan hama cukup tinggi, banyak ditinggalkan oleh warga desa. Maka, komunitas yang semula merupakan *rural peasant society* itu secara pasti bergeser menjadi *sub-urban community* yang rapuh dan ambigu.

Kasus kedua ialah lokalisasi air sumber untuk memenuhi kebutuhan dan kemudahan rumah tangga di desa-desa di wilayah Keduwang. Terdorong oleh keinginan untuk hidup lebih mudah dan “maju”, menyusul peningkatan taraf ekonomi dan ketersediaan alat yang dihasilkan oleh industri, orang desa mengalirkan air dari sumber-sumber di sekitar sungai ke dalam rumah-rumah mereka. Sama seperti halnya eksploitasi air oleh pabrik, proses ini membawa akibat sertaan yang mereka sendiri tidak sadari hingga sekarang. Sungai yang menjadi pemasok air satu-satunya bagi sawah-sawah yang juga merupakan satu-satunya gantungan hidup mereka, tidak lagi mengalir -kecuali di musim penghujan-, ditumbuhi gulma dan menjadi sempit. Air dan sungai yang mulanya menjadi representasi kehidupan dan harga diri, mendadak kehilangan posisi simboliknya. Sungai pada masa kini tidak lebih sebagai tempat membuang limbah rumah tangga, mengalirkan air tadah hujan dari kebun-kebun maupun halaman rumah dan banyak juga yang menjadi tempat membuang sampah dan kotoran manusia. Tidak ada lagi pusat kekuatan (*power*) yang berpusar di *tempuran* (pertemuan dua sungai) untuk diunduh oleh para ahli spiritual kejawen. Yang ada tinggallah plastik-plastik bekas bungkus makanan ringan (*snack*) yang berserakan, dan remaja-remaja berkulit bersih berpenampilan ala kota besar. Sawah-sawah pun berubah lebat ditumbuhi semak, atau malah banyak yang berubah wujud

menjadi sepeda motor dan mobil omprengan, karena dunia pertanian dan menjadi petani sudah tidak lagi menarik bagi mereka. Butuh modal cukup besar untuk mengalirkan kembali air-air ke sawah mereka, tetapi hasilnya sering tidak menentu dan kulit mereka menjadi kusam.



Daftar Rujukan

Agustono, 2002.

Harris, Marvin. 1979. *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. New York: Random House

Kardono. Tth. "Water Resource Management in Indonesia: Condition and its Environmental Technology". Kertas kerja. Tidak diterbitkan.

Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria. Tth. "Berebut Tanah: Sebuah Pengantar" dalam *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berprespektif Kampus dan Kampung*. Insist, Jurnal Antropologi Universitas Indonesia dan Karsa.

Luknanto, Djoko. 2002. "Air, Banjir: Persepsi dan Salah Persepsi". Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional KATGAMA Ulang Tahun Pendidikan Tinggi Teknik (PTT) ke 56.

Redfield, Robert. 1965. *Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*. Chicago: University of Chicago Publisher.

Suharjo, Sartono Putro dan Noor Anna. 2006. "Perubahan Penggunaan Lahan dan Dampaknya terhadap Kualitas Air Tanah di Sukoharjo Sebagai daerah Penyangga Kota", dalam *Jurnal Penelitian Sains & Teknologi*. Vol. 7. No. 1. Hal: 42-54.

Wangsaatmaja, Setiawan. dkk. 2006. "Permasalahan dan Strategi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan" dalam *Jurnal Geologi Indonesia*. Vol. 1 No. 3, Hal. 163-177.

Wolf, Eric. 1966. *Peasant*. New York: Prentice Hall Publisher.

